

PENGISIAN JABATAN ESELON IIB TUNGGU KASN Pilih Calon yang Menguasai Persoalan

BANTUL (KR) - Pelantikan jabatan eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Meski panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah mengumumkan hasil seleksi tiga besar pada tiap lowongan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala badan. Sementara Ketua DPRD Bantul, H Hanung Raharjo ST, minta bupati berkomunikasi dengan partai koalisi pendukung bupati dan wakil bupati Bantul dalam menentukan pilihan, meski hal tersebut hak prerogatif bupati.

"Sekarang ini prosesnya tinggal menunggu rekomendasi dari KASN turun. Karena kami telah melaporkan tiga kandidat disetiap formasi ke KASN," ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul, Isa Budi Hartomo, Minggu (5/12).

Diharapkan rekomendasi KASN bisa segera keluar. Karena begitu rekomendasi keluar, bupati bakal memilih satu dari tiga orang di masing-masing formasi. Selanjutnya mereka yang dipilih dilantik menjadi JPT Pratama. Pemilihan satu dari tiga orang setiap formasi tentunya jadi hak prerogatif Bupati Bantul. KASN hanya memberikan rekomendasi hasil seleksi akhir JPT Pratama dimulai pendaftaran, rekam jejak, uji kompetensi, makalah, wawancara hingga ujian gagasan.

Tiga nama yang lolos seleksi calon

kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yakni Anwar Nur Fahrudin, Gunawan Budi Santoso serta Sri Kayatun. Kemudian calon Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Yuli Herwanta, Besari Setyowati, Pambudi Arifin Rakhman. Calon Kepala Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP) yakni Imawan Eko Handriyanto, Joko Waluyo, serta Slamet Pamuji.

Calon kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) adalah Istiril Widilastuti, Mujahid Amrudin, dan Singgih Riyadi. Adapun calon kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah Hartini, Stephanus Heru Wismantara dan Yohanes Ariyanto.

Terpisah Ketua DPRD Bantul, H Hanung Raharjo ST, mengatakan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan hak prerogatif Bupati Bantul. Tetapi sebaiknya menjalin komunikasi dengan partai koalisi pendukung Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam Pilkada lalu. Sebagai contoh, presiden ketika menyusun kabinet tetap berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi.

Sementara Anggota Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, memberikan mengapresiasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Satu orang setiap formasi yang bakal dipilih bupati benar-benar menguasai permasalahan di setiap OPD. **(Roy)-f**

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Gelimasjiwo Berhasil Raih Top-45



KR-Judiman

Piagam Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2021 dibawa inisiatif Gelimasjiwo, Siti Mulyani.

BANTUL (KR) - Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo (Gelimasjiwo) berhasil meraih Top-45 Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI.

Kompetisi ini diikuti 3.500 peserta dari berbagai instansi se-Indonesia. Dari jumlah tersebut pada tahap semifinal diambil 90 juara dan akhirnya terpilih 45 juara atau Top-45. Salah satunya yakni Gelimasjiwo.

Asekda Bidang Sumberdaya dan

Kesejahteraan Rakyat, Ir Pulung Haryadi MSI, pada acara Gebyar Gelimasjiwo di Gedung Maducandha, Minggu (5/12), mengungkapkan Gelimasjiwo merupakan program inovasi Pemkab Bantul untuk menangani permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), diawali dari Puskesmas Kasihan 2 yang muncul dari inisiatif seorang perawat, Siti Mulyani AMd Kep, yang sekarang sudah direplikasi di beberapa Puskesmas di Bantul.

Sementara menurut Siti Mulyani, terbentuknya Gelimasjiwo diawali tahun 2012 dari keprihatinan kondisi masyarakat di Kasihan wilayah tugas Puskesmas Kasihan 2 yang waktu itu terdapat banyak warga berkriteria ODGJ dengan kondisi ekonominya yang memprihatinkan dan tidak ada upaya untuk pengobatan. "Waktu itu, melihat kondisi tersebut kami berpikir harus diapakan ini, sehingga kami mengambil inisiatif untuk menangani mereka yang tidak berdaya menjadi berdaya. Mereka harus diobati," papar Siti.

Mulai saat itu dibentuklah kelompok yang peduli terhadap kondisi ODGJ, dengan menamakan diri Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo atau Gelimasjiwo. Dengan Gelimasjiwo yang didukung dari lintas sektor, juga peran Puskesmas yang sangat sentral dan suport dari pemerintah kapanewon, Gelimasjiwo bergerak jemput bola untuk melakukan pengobatan terhadap ODGJ. **(Jdm)-f**

DIY Perlu Miliki Komisi Pariwisata Daerah

BANTUL (KR) - Mengingat visi pariwisata dimiliki DIY maupun daerah, sudah selayaknya ide pembentukan Komisi Pariwisata Daerah mencuat dalam 'Jagongan Jogja'. Sehingga pentahelix atau pentagon yang lain bisa ikut memikirkan. Mengingat sektor pariwisata dimensinya sangat begitu luar biasa.

Hal tersebut dicuatkan Sekda Gunungkidul Ir Drajad Ruswandono MT dalam diskusi 'Jagongan Jogja' sesi 1 yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) DIY dengan UMY, Sabtu (4/12). Sesi pertama dengan moderator Ir Sri Atmaja PhD menghadirkan narasumber Sekda Gunungkidul Ir Drajad Ruswandono MT, Kepala Bapeda Kulonprogo Triyono SIP MSI.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono MEng DEng IPU ASEAN Eng, Ketua PHRI DIY Dedy Pranowo Eryono, Rektor UMY Prof Dr Ir Gunawan Budiyanto dan Ketua PII DIY Ir Tribudi Utama MT.

"Kita butuh *tenanan* dan profesional. Apalagi kita mau menuju pariwisata internasional. Internasional sudah kami dapat di Nglanggeran sudah internasional, tapi bagaimana dengan destinasi yang lain," tandas Drajad merespons pertanyaan ProfAlfa dalam dialog.

Disebutkan, untuk semua itu pihaknya sudah mencoba memindahkan ternak menjadi satu lokasi di Gunungkidul, yang tersebar di wilayah selatan. Sudah siapkan lokasi sampah dan lainnya. "Namun kami butuh partner, agar dapat konkrit. Sebagai pembantu bupati, visi bagi kami merupakan pertarungan" ungkapnya.

Sebelumnya, dalam pembahasan Ketua PII DIY Ir Tribudi Utama MT mengakui bahwa bicara pariwisata sekarang ini sudah menjadi *rada primer*. Maka PII perlu di tengah, bagaimana membangun kem-

bali agar supaya orang ingin ke destinasi wisata.

"Dalam masa pandemi, pariwisata itu paling *nyungsep*. Karena dalam pariwisata itu ada deretan lain mulai transportasi, rumah makan, hotel, guide dan lainnya yang ikut *nyungsep* pula," tambahnya.

Untuk menghidupkan pariwisata ke depan, menurutnya konsep wisata harus berbeda. Tidak harus 10A, namun menurut Ketua PII, bisa dilihat dari 3A dulu yakni atraksi, aksesibilitas dan amenity.

Untuk atraksi sebut Tribudi, DIY ini kaya akan wisata budaya, alam, tradisi dan lainnya. Namun menurut Tribudi, sayangnya sering kurang dikenal. Bahkan ada ironi, kalau kita melohat di relevelis internasional atau youtube sering muncul wisata Borneo dan itu dari Malaysia. "Padahal Borneo Malaysia yang disebut itu kan hanya *sak-umplik* dari Kalimantan yang dimiliki Indonesia. Namun kemasan itu yang dilihat," ujarnya.

Sedang untuk aksesibilitas menurut Ketua PII sekarang bisa dikembangkan akses virtual. Misal dikembangkan dan disediakan tepat selfie yang instagrameable. "Kulonprogo bisa menjual itu yang sekarang dikenal Jalur Luna Maya. Gunungkidul itu luar biasa. Tidak ada pantai yang sebanyak Gunungkidul, Mulai yang klasik seperti Baron, Krakal, Kukup hingga Indrayanti dan lainnya yang belum Bernama," ujarnya.

Untuk itu, Tribudi meminta PII Cabang Gunungkidul dan Kulonprogo berkolaborasi dengan pemda setempat mendampingi dan mengembangkan destinasi wisata potensial namun belum berkembang dan belum dikenal. "Garap segera dan 3 tahun sesuai masa kepengurusan sudah menjadi destinasi terkenal," ujarnya. **(Fsy)-f**

IDHAM SAMAWI RESMIKAN TALUT DI PIYUNGAN

Mendukung Keberadaan Objek Wisata

PIYUNGAN (KR) - Harapan masyarakat Dusun Bintaran Wetan Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul agar talut longsor diperbaiki, akhirnya terwujud. Usulan warga agar long-sornya talut di bantaran Kali Gawe dikawal anggota DPR RI, Drs HM Idham Samawi dan

sudah dibangun. Perbaikan infrastruktur tersebut selain melegakan warga juga mendukung keberadaan Objek Wisata Pasar Kebon Pring.

"Pada awalnya kami menyampaikan keluhan dari warga. Tahun 2016 tebing di Kali Gawe longsor, kondisi diperburuk ketika badai cempaka 2017. Kemudian kami mengajukan ke Dinas PU Bantul, Dinas PU DIY termasuk ke Balai Besar," ujar Kepala Dukuh Bintaran Wetan Srimulyo Piyungan, Tukiran, disela peresmian mendampingi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Idham Samawi, Minggu (5/12).

Dalam acara tersebut juga dihadiri anggota DPRD Bantul Nur Yuni Astuti SSos SH, Penewu Piyungan Anton Yulianto AP MIP, Lurah Srimulyo Piyungan H Wajiran, perwakilan Balai Besar Supriyadi.

Dijelaskan, proses pengajuan dilakukan ketika Idham Samawi meresmikan Jembatan Ngampon Piyungan Bantul. "Waktu itu saya menyampaikan ke Pak Idham long-sornya tebing sejak tahun 2017 namun belum bisa diperbaiki. Kemudian Pak Idham mengawal usulan kami, sehingga akhirnya impian warga terakumulasi tahun 2021," ujar Tukiran.

Menurutnya, Idham Samawi da-



KR-Sukro Riyadi

Idham Samawi menandatangani prasasti peresmian talut didampingi Wajiran dan Nur Yuni Astuti.

lam memperjuangkan rakyat Bantul tidak perlu diragukan. "Alhamdulillah saat ini sudah terealisasi, masyarakat saya sangat puas dan senang sekali karena apa yang diminta oleh warga sudah diwujudkan," ujarnya.

Bahkan pembangunan infrastruktur talut lebih panjang dari keinginan warga. "Itu yang dikerjakan justru bertambah panjang sampai pintu masuk Objek Pasar Kebon Pring. Artinya aktivitas masyarakat sudah kembali normal, jalan bisa dilalui oleh warga. Selain itu dua rumah warga sekarang sudah ditempati tanpa rasa khawatir longsor susulan," ungkapnya.

Sementara Lurah Srimulyo, H Wajiran, mengatakan jika bantaran sungai sering banjir dan berdampak longsor. Sehingga pada waktu itu warga minta dicarikan solusi. "Karena biayanya cukup tinggi, kalau di kabupaten nampaknya tak mungkin. Provinsi mungkin cuma kecil. Sehingga jawabannya adalah

harus lewat DPR tingkat pusat. Pak Idham ini wakil kita. Terima kasih Pak Idham, Alhamdulillah tahun ini atas doa restu dari semua lapisan masyarakat talut dibangun dengan anggaran Rp 6 miliar," ujar Wajiran.

Anggota Komisi III DPR RI, Drs HM Idham Samawi, menjelaskan dengan talut tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat. "Waktu saya meresmikan Jembatan Ngampon tahun 2019, Pak Lurah Srimulyo yakni Pak Wajiran datang menemui saya cerita kalau ada talut longsor belum diperbaiki padahal kondisinya sangat mengancam pemukiman warga. Waktu itu saya cek dan memang benar kemudian saya sampaikan ke Pak Menteri PU dan alhamdulillah sekarang terealisasi," ujar Idham.

Menurutnya, sikap Lurah Srimulyo sangat benar dan patut dicontoh. Kalau sudah menyangkut kepentingan rakyat apapun harus dilakukan seperti tindakan Lurah Srimulyo. **(Roy)-f**



KR-Sukro Riyadi

Ketua RT 5 Bintaran Wetan, Isnawan, menjelaskan manfaat talut kepada Idham Samawi.



KR-Sukro Riyadi

Idham Samawi (membawa kendi) meresmikan talut.



DPRD KABUPATEN BANTUL

Mimbar Legislatif

Jl. Jend. Sudirman, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

ARIF HARYANTO SSI KETUA FRAKSI PKS

Modernisasi Pasar Rakyat

BANTUL (KR) - Menyebut pasar rakyat atau pasar tradisional sering kali identik dengan bangunan tua tidak terurus, kumuh, becek, bau, saluran mampet sampai muncul stigma lingkungan tidak aman. Padahal, dahulu pasar rakyat justru menjadi salah satu lokasi terfavorit bertemunya berbagai interaksi manusia.

Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat, Arif Haryanto, Minggu (5/12), mengatakan dilihat dari sisi budaya, proses tawar menawar sejatinya bukan sekedar proses transaksi bisnis semata. Di dalamnya terkandung penghargaan tinggi akan sikap, budaya dan toleransi sesama manusia. Semuanya dilakukan penuh penghormatan tanpa ada niat untuk sekedar mencari untung. Oleh karena itu degradasi pasar rakyat wajib mendapat perhatian yang serius.

Banyak pihak menilai, maraknya kehadiran pasar/toko modern sebagai penyebab kemunduran pasar rakyat. Pemerintah dianggap tidak melindungi pasar rakyat. Hal tersebut berimbas pada konsumen yang berbondong-bondong pindah dari pasar rakyat ke pasar/toko modern.

Menurut Arif, bangunan megah, sejuk, bersih, bebas banjir, lingkungan aman dan nyaman dari pasar/toko modern menjadi godaan yang terlalu sulit untuk ditolak. Upaya penyelamatan dari pemerintah sesungguhnya sudah dilaksanakan. Setiap tahun muncul skema bantuan program revitalisasi pasar rakyat yang dianggarkan dalam APBD.

Tapi besaran anggaran tersebut sepertinya belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. "Berkaca dari pelajaran tersebut, revitalisasi sepertinya menjadi kunci utama penyelamatan pasar rakyat," ujar anggota Komisi B DPRD Bantul ini.

Sementara revitalisasi tidak harus selalu dimaknai 'besarnya anggaran' oleh pemerintah. Revitalisasi justru harus lebih dimaknai sebagai upaya



KR-Istimewa

Arif Haryanto SSI.

'perubahan mendasar manajemen' pengelolaan pasar rakyat menuju pasar modern yang menjadi idaman bagi konsumen.

Mewujudkan cita-cita besar menjadikan pasar rakyat sebagai pasar idaman tersebut DPRD Bantul bersama Pemerintah Daerah sedang melakukan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang telah memasuki tahap finalisasi pembahasan.

Dijelaskan, kriteria utama pasar idaman adalah kebersihan. Pasar rakyat harus bersih, jangan sampai volume sampah melebihi volume barang. Lingkungan juga bersih, rapi, tertata, nyaman dan tidak becek. Pasar rakyat harus sehat, dimana barang yang diperdagangkan harus higienis, tidak kadaluwarsa dan tidak berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Selain itu pasar rakyat juga dituntut sepertinya belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. "Berkaca dari pelajaran tersebut, revitalisasi sepertinya menjadi kunci utama penyelamatan pasar rakyat," ujar anggota Komisi B DPRD Bantul ini.

Sementara revitalisasi tidak harus selalu dimaknai 'besarnya anggaran' oleh pemerintah. Revitalisasi justru harus lebih dimaknai sebagai upaya

gang harus mampu menjaga keseimbangan dan kesetaraan harga yang wajar dalam berbagai jenis barang yang diperdagangkan.

Kriteria pasar idaman terakhir adalah kesejahteraan. Pasar rakyat harus mampu menjamin terciptanya kesejahteraan, bukan hanya untuk pedagang melainkan juga konsumennya.

Keseluruhan kriteria pasar idaman tersebut telah tertuang dalam rancangan peraturan daerah yang terangkum dalam fungsi pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana pokok dan sarana prasarana pendukung.

Sarana dan prasarana pokok terdiri atas, bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan. Termasuk bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Sarana dan prasarana pendukung terdiri atas kantor pengelola, areal parkir kendaraan tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah.

Menurutnya, tidak kalah penting dari berbagai aspek ketersediaan sarana dan prasarana, dalam rancangan peraturan daerah ini juga diatur tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas manajemen pedagang, penguatan modal, kemitraan dan promosi pasar. Termasuk didalamnya kerjasama pemasaran secara online.

Diharapkan nantinya setelah Perda ini disahkan, mampu menjawab berbagai problematika pengelolaan pasar yang selama ini terjadi dan mampu mewujudkan pasar rakyat modern yang menjadi idaman masyarakat dan mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. **(Roy)-f**